



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 191326

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 10.900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 568 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.200.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/50 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah Seluas 2.170 m2 di KAB / KOTA BADUNG, WARISAN Rp. 4.000.000.000
5. Tanah Seluas 1.920 m2 di KAB / KOTA BADUNG, WARISAN Rp. 3.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 110.000.000

1. MOTOR, SCOOPY SEPEDA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, YARIS 2021 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 25.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 11.035.000.000

III. HUTANG

Rp. 10.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 11.025.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.